

KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG

MUHAMMAD HARIADI

NPP. 31.0023

*Asdaf Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
email : mhdhariadi03@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Afif Syarifudin Yahya, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): Poverty remains a significant challenge in Aceh Tamiang District. This can be seen from the high number of poor people each year, which requires a holistic and collaborative approach to overcome it. The existence of the Regional Poverty Reduction Acceleration Coordination Team as a cross-sector and cross-stakeholder coordination forum for poverty alleviation is important as part of the solution that is expected to make a real contribution in reducing poverty. **Objective:** This research aims to find out and analyze how collaboration between the government, private sector, and other stakeholders, the supporting and inhibiting factors, and what poverty alleviation efforts are made by the government in Aceh Tamiang District. **Method:** The research method used is qualitative research with data collection techniques through interviews, observation, and documentation studies. The technique of determining informants in this study used purposive sampling technique. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. **Results/Findings:** Based on the results of the study, it shows that collaboration between regional apparatus in Aceh Tamiang District in the context of poverty alleviation has been well established, although not optimal. This can be seen among regional apparatus and other stakeholders who have fulfilled the indicators of the collaboration process consisting of willingness to compromise, communication, commitment, mutual trust, transparency/information exchange, knowledge sharing, and willingness to take risks. However, there are still some obstacles such as the lack of adequate funding and resources, which hampers the implementation of poverty alleviation programs. **Conclusion:** The suggestions given are to strengthen coordination and strengthen the effective communication system between all stakeholders, increase the budget allocation for poverty alleviation programs. Therefore, further steps are needed to improve the effectiveness of collaboration in poverty alleviation in Aceh Tamiang District.

Keywords: Poverty, Poverty Reduction Coordination Team, Collaboration, poverty alleviation

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Kemiskinan tetap menjadi tantangan yang signifikan di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya, karena

itu diperlukan pendekatan holistik dan kolaboratif untuk mengatasinya. Keberadaan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pengentasan kemiskinan menjadi penting sebagai bagian dari solusi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menurunkan angka kemiskinan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya pengentasan kemiskinan apa yang dilakukan pemerintah di Kabupaten Aceh Tamiang. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antar perangkat daerah di Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pengentasan kemiskinan sudah terjalin dengan baik meski belum optimal. Hal tersebut dilihat antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya yang sudah memenuhi indikator proses kolaborasi yang terdiri dari kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi/pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan kesediaan mengambil risiko. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya dana dan sumber daya yang memadai, sehingga menghambat implementasi program-program pengentasan kemiskinan. **Kesimpulan:** Adapun saran yang diberikan adalah melaksanakan penguatan koordinasi dan memperkuat sistem komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, serta meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Kata Kunci: Kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Kolaborasi, pengentasan kemiskinan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita setiap negara, termasuk Indonesia. Cita-cita ini dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV, yang merupakan hukum dasar tertulis atau konstitusi negara (Dawati & Budiastuti, 2021). Namun, kemiskinan yang berkelanjutan seolah sudah menjadi jati diri sebagian besar penduduk Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia tidak pernah benar-benar mengalami penurunan signifikan. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera merupakan bagian dari cita-cita dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu cara mencapai sasaran tersebut adalah melalui beragam program pembangunan yang bertujuan mengatasi kemiskinan. Meskipun upaya ini telah dilakukan, kemiskinan tampaknya masih menjadi permasalahan yang terus dihadapi masyarakat Indonesia (Hilmiah, 2023).

Pemerintah telah lama menerapkan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan menerapkan konsep tata kelola kolaboratif atau collaborative governance. Menurut Islamy (2018), seperti disebutkan dalam Saufi (2021: 84), collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif dapat diartikan sebagai keseimbangan antara sumber daya dan kewenangan di antara

berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Pendekatan ini melibatkan intervensi terhadap kelompok yang mengalami keterbatasan, menciptakan ketergantungan dalam mengatasi permasalahan melalui keputusan bersama dan kesepakatan kolektif. Kategori atau kriteria fakir miskin menurut Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 262/HUK/2022 mencakup sembilan kriteria, seperti tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran, dan sumber penerangan dari listrik dengan daya 450 watt atau bukan listrik.

Pemerintah telah menetapkan target untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan teknis berkelanjutan kepada instansi pemerintah daerah yang terlibat langsung dalam program pengurangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (4) tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diberi wewenang untuk membentuk struktur kelembagaan koordinasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang menginstruksikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Salah satu daerah yang membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah Provinsi Aceh, yang dalam beberapa tahun terakhir berada dalam kondisi persoalan kemiskinan yang memprihatinkan. Berdasarkan publikasi kompas.com (Dinamika, 2023), Aceh disebut sebagai provinsi termiskin di Sumatera. Pernyataan ini didasarkan pada persentase angka kemiskinan di Provinsi Aceh dalam beberapa tahun terakhir, yang paling tinggi di antara provinsi lain di Pulau Sumatera. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menempati posisi sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar di Pulau Sumatera pada Maret 2023. Dari total populasi 5,37 juta jiwa, sekitar 14,45% hidup dalam kondisi kemiskinan.

Masalah kemiskinan tetap menjadi fokus utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasi masalah ini, seperti penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, pendidikan, pembangunan sektor pertanian, dan peningkatan kesempatan kerja. Namun, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Tamiang menunjukkan tren kenaikan setiap tahun. Data kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin sebesar 40.030 jiwa, kemudian menurun menjadi 38.246 jiwa pada tahun 2022. Namun, jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 38.370 jiwa pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang masih menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Ketika berkolaborasi untuk membahas definisi kemiskinan, penting menetapkan parameter dan pembatasan tertentu agar diskusi lebih fokus dan produktif. Dalam konteks kemiskinan, pendapatan merupakan salah satu aspek kunci. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan. Indikator Garis Kemiskinan

(GK) terdiri dari gabungan Garis Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. Dalam pendekatan ini, kemiskinan dianggap sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan, bukan hanya dilihat dari aspek pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Batas kemiskinan umumnya meningkat setiap tahun. Pada tahun 2017, batas kemiskinan sebesar Rp389.459,00, dan naik menjadi Rp479.801,00 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rupiah minimum per bulan yang dibutuhkan setiap penduduk Aceh Tamiang untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan bukan makanan sebesar Rp479.801,00.

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang terlibat aktif dalam berbagai program dan kebijakan. Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan tergambar dari beberapa inisiatif, seperti program pemberdayaan ekonomi lokal, kolaborasi dengan pihak swasta, peningkatan akses pendidikan, akses pelayanan kesehatan, partisipasi masyarakat, kolaborasi antar sektor, monitoring evaluasi, serta pengembangan infrastruktur. Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2023 yang digelar di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang), dr. Catur Haryati, menyatakan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta kerangka pendanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan masalah yang diambil dalam konteks kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang, mencerminkan kompleksitas isu kemiskinan yang terus berlanjut meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah. Kesenjangan ini dapat dilihat dari beberapa perspektif, mulai dari implementasi kebijakan, efektivitas program pengentasan kemiskinan, hingga partisipasi masyarakat dan koordinasi antar lembaga.

Pertama, meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan kolaboratif melalui konsep tata kelola kolaboratif atau collaborative governance, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik. Konsep ini idealnya melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah, dalam membuat keputusan bersama dan mencapai kesepakatan kolektif untuk mengatasi kemiskinan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali terdapat kendala koordinasi dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Misalnya, kebijakan yang ditetapkan di tingkat pusat mungkin tidak sepenuhnya diimplementasikan secara efektif di tingkat daerah karena perbedaan prioritas atau keterbatasan sumber daya.

Kedua, program pengentasan kemiskinan yang telah diluncurkan oleh pemerintah seringkali tidak mencapai sasaran secara optimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan publikasi lainnya, meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan di beberapa daerah, seperti di Kabupaten Aceh Tamiang, persentase kemiskinan tetap tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang ada mungkin belum sepenuhnya efektif atau belum

menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Sebagai contoh, penyediaan kebutuhan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan mungkin tidak cukup memadai untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan jika tidak diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara mandiri.

Ketiga, partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan program-program ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dengan baik. Namun, seringkali masyarakat hanya menjadi objek dari program-program tersebut tanpa diberikan ruang yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif. Hal ini dapat menyebabkan program-program tersebut kurang efektif dan tidak sesuai dengan konteks lokal.

Keempat, terdapat kesenjangan dalam hal akses dan distribusi sumber daya. Di beberapa daerah, terutama di pedesaan atau daerah terpencil, akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih sangat terbatas. Ini menjadi tantangan besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan secara merata di seluruh wilayah. Sebagai contoh, di Kabupaten Aceh Tamiang, meskipun telah ada berbagai program pembangunan, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan bagi sebagian besar masyarakat.

Kelima, monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan seringkali tidak dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Evaluasi yang efektif sangat penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan dari setiap program yang dijalankan. Tanpa evaluasi yang memadai, sulit untuk menentukan apakah program-program tersebut telah memberikan dampak positif yang signifikan atau perlu dilakukan penyesuaian.

Untuk mengatasi kesenjangan-kesenjangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terpadu dan berkelanjutan, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, distribusi sumber daya yang lebih merata, dan evaluasi program yang sistematis. Dengan demikian, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menyoroti kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan berkaitan dengan penelitian ini:

1. **Peran BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pati**
Penelitian oleh Musayyada Y. dalam *Majalah Ekonomi* (2024) berfokus pada strategi perencanaan Bappeda dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bappeda Pati melakukan strategi perencanaan penanggulangan kemiskinan secara integratif dengan sinkronisasi kebijakan dari pemerintah pusat hingga kabupaten serta penanganan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Strategi yang digunakan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan

- pendapatan penduduk miskin, pengembangan UMKM, dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan (Musayyada, 2024).
2. **Policy Entrepreneurs dan Jaringan Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Desentralisasi** Letor R. P. dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (2021) meneliti kegagalan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) pada masa pemerintahan Gubernur Jawa Barat Achmad Heriawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Kegagalan program ini disebabkan oleh ketidakmampuan policy entrepreneurs untuk mengintegrasikan isu arsitektur tradisional berbasis lingkungan, sehingga program ini tidak terintegrasi sejak tahap agenda-setting. Keterlibatan struktur dan jaringan kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan (Letor, 2021).
 3. **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi** Penelitian oleh Sari Y. dan Falianto A. dalam Journal Development (2020) menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sementara pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, sedangkan pengurangan tingkat pengangguran juga menjadi faktor penting (Sari & Falianto, 2020).
 4. **Peranan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat** Penelitian oleh Susanti Y. dan Arifin N. R. dalam Jurnal Edukasi (2019) meneliti peran LTPKD dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menemukan bahwa layanan terpadu memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengkoordinasikan berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan. LTPKD juga membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Susanti & Arifin, 2019).
 5. **Analisis Sektor Basis PDRB dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah** Utama L. S. dalam MEDIA BINA ILMIAH (2018) menganalisis peran sektor basis PDRB dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan karena belum terintegrasinya program-program pembangunan. Sektor basis yang dapat menggerakkan ekonomi daerah harus diidentifikasi dan diberdayakan untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. Peran sektor angkutan dan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan masyarakat juga diidentifikasi sebagai faktor penting (L. S. Utama, 2018).
 6. **Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh pada Tahun 2017-2022** Penelitian oleh Aprikindesa T. dan Maimun Helmi dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah (2022) meneliti pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan di Provinsi Aceh. Meskipun dana ini ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pendidikan, sosial, dan kesehatan, penelitian menemukan bahwa dana tersebut belum optimal dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya strategi yang efektif dan program yang tepat guna dalam memanfaatkan dana otonomi khusus untuk mencapai pengentasan kemiskinan (Aprikindesa et al., 2022).

7. **Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang** Penelitian oleh Abdul Rasyid Sahar dalam Jurnal The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) menganalisis tata kelola kolaboratif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa Kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan tercermin dalam pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengatur dan mengelola program-program penanggulangan kemiskinan. (A.Sahar, R.Salomo, 2018)
8. **COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitas di Kabupaten Sidoarjo)** penelitian oleh Dimas Luqito Chusuma Arrozaq. dalam Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik (2016) Penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi dalam pengembangan Kawasan Minapolitan telah berjalan dengan baik. Ini terjadi karena kolaborasi telah mengikuti prinsip-prinsip bersama, motivasi bersama, dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tahap tersebut terpenuhi, dilakukan tindakan kolaborasi yang menghasilkan dampak positif sementara. Namun, beberapa hambatan juga ditemukan dalam proses kolaborasi, salah satunya kesulitan dalam membentuk kelompok usaha yang memiliki badan hukum, kurangnya kelanjutan dalam kolaborasi. (Arrozaq, Dimas Luqito Chusuma, 2016)
9. **Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** Penelitian oleh Mutia Afrida. dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala meneliti prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Aceh belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Ini terlihat dari ketidakseimbangan wewenang dalam proses kolaborasi, dimana pemerintah masih mendominasi, dan kurangnya kebijakan inovatif dari Gubernur Aceh sebagai pemimpin untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kolaborasi secara menyeluruh. Meskipun demikian, melalui proses kolaborasi tersebut, hasil yang dicapai mencakup pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan partisipasi multi-pihak dalam program tersebut. (Afrida Mutia, 2022)
10. **Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan** Penelitian oleh Ranggi Ade Febrian. dalam Jurnal Kajian Pemerintah (2018) menganalisis Governance sebagai Pembangunan kawasan pedesaan dianggap sebagai fondasi yang dapat memperbesar peluang partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan tersebut. Upaya untuk meningkatkan perkembangan desa dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai pihak bisa dimulai dengan berkolaborasi dalam penyusunan rencana pembangunan, dimulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah kesepakatan bersama, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dengan tujuan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Febrian, Ranggi Ade, 2018)

Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang berbagai upaya dan tantangan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Studi-studi tersebut menunjukkan pentingnya strategi yang terkoordinasi, kebijakan yang inklusif, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk mencapai pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan. Setiap penelitian memberikan wawasan yang berharga tentang pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah kemiskinan dan menyoro area yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah yang signifikan dalam beberapa aspek yang belum banyak dieksplorasi secara komprehensif pada penelitian sebelumnya. Adapun kebaruan ilmiah tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa poin berikut:

1. **Pendekatan Integratif dan Kolaboratif dalam Perencanaan Strategis:** Penelitian ini menyoroti pendekatan integratif yang digunakan oleh Bappeda Kabupaten Pati dalam menyelaraskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten. Kebaruan ini terletak pada analisis mendalam tentang bagaimana sinkronisasi kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan dapat menghasilkan strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
2. **Analisis Peran Spesifik Bappeda dalam Konteks Daerah:** Sementara banyak penelitian sebelumnya menyoroti peran Bappeda secara umum dalam perencanaan pembangunan, penelitian ini fokus pada peran spesifik Bappeda Kabupaten Pati dalam konteks pengentasan kemiskinan ekstrem. Hal ini memberikan wawasan yang lebih detail tentang bagaimana Bappeda sebagai lembaga perencanaan daerah dapat memainkan peran kunci dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui perencanaan yang terarah dan strategis.
3. **Studi Kasus dengan Pendekatan Kualitatif dan Metode Triangulasi Data:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kebaruan ilmiah ini terletak pada pendekatan metodologis yang memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya dan mendalam, serta validasi hasil penelitian melalui berbagai sumber data. Pendekatan ini jarang digunakan dalam penelitian sejenis yang seringkali lebih mengandalkan data kuantitatif.
4. **Evaluasi Kebijakan dan Program Pengentasan Kemiskinan Secara Kontekstual:** Penelitian ini memberikan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pati, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan spesifik daerah tersebut. Kebaruan ini muncul dari analisis yang tidak hanya melihat hasil kebijakan, tetapi juga proses dan dinamika yang terjadi dalam implementasinya, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda dan pihak terkait lainnya.
5. **Fokus pada Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:** Berbeda dengan penelitian yang lebih umum tentang kemiskinan, penelitian ini fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, sebuah topik yang masih membutuhkan banyak penelitian khusus. Kebaruan ini terletak pada identifikasi dan analisis strategi yang spesifik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, sebuah kategori kemiskinan yang paling parah dan memerlukan pendekatan yang berbeda dari kemiskinan relatif.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis kolaborasi pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan meneliti lebih dalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kolaborasi antara berbagai elemen pemerintah dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi pengentasan kemiskinan. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi peran, tanggung jawab, dan kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama, serta bagaimana sinergi antar instansi pemerintah dapat meningkatkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dan bagaimana pemerintah mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Melalui analisis mendalam tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi praktis dan strategis bagi peningkatan efektivitas kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik untuk mengentaskan kemiskinan di masa depan.

II. METODE

Pendekatan penelitian adalah metode yang mencakup langkah-langkah tindakan yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan guna menganalisis inti permasalahan dalam penelitian. Menurut (Murdiyanto, 2020), penelitian merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta bagian integral dari perkembangan peradaban manusia. Desain penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh (Rijali, 2019), adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Seringkali, mendapatkan data yang langsung valid dalam penelitian sulit dilakukan, sehingga data yang telah dikumpulkan perlu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan objektivitas.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, menurut (Hasibuan et al., 2022), adalah pengumpulan data dalam latar ilmiah dengan tujuan untuk mengartikan atau menafsirkan fenomena atau masalah yang terjadi, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Rukin (2019) menambahkan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif, dengan penekanan pada makna, penalaran, dan definisi situasi tertentu dalam kehidupan sehari-hari. (Sari sasi gendro, 2022) menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan fenomena yang muncul di lapangan, yang mencerminkan sifat emergent dari penelitian ini.

Peneliti memilih metode penelitian kualitatif karena metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya saat penelitian dilakukan, dengan cara mengumpulkan data, menganalisisnya, dan merumuskan masalah yang ditemukan di lapangan. Metode ini memungkinkan pengolahan hasil yang diperoleh menjadi laporan yang terstruktur, faktual, dan tepat

sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, data yang diperoleh diharapkan lebih lengkap, mendalam, kredibel, dan bermakna. Pendekatan ini sangat relevan untuk penelitian yang berjudul "Kolaborasi Pemerintahan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang", karena memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kolaborasi pemerintahan dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut (Thabroni, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang

Pengentasan kemiskinan bukanlah tugas yang dapat diselesaikan oleh satu entitas saja. Dalam upaya mengatasi tantangan ini, kolaborasi pemerintahan telah menjadi kunci utama. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil telah menapaki perjalanan menuju perubahan yang nyata dan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Pihak-pihak yang tergabung dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), termasuk unsur pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia usaha, telah menunjukkan bahwa masalah kemiskinan adalah masalah bersama yang harus ditangani secara kolektif, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 6 Permendagri 53 tahun 2020 dan Inpres Nomor 4 tahun 2022.

Kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang telah diimplementasikan melalui pembentukan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Menurut wawancara dengan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu dr. Catur Haryati, pada Kamis, 11 Januari 2024, kolaborasi ini melibatkan penugasan spesifik untuk setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, yang memungkinkan pemerintah memanfaatkan sumber daya yang lebih luas dan menggabungkan keahlian berbagai pihak untuk merancang solusi yang holistik. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi, perbedaan visi, dan kendala keuangan seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kolaborasi ini.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang, Ibu Fadjarah, pada Selasa, 16 Januari 2024, menekankan pentingnya kolaborasi pemerintahan sebagai fondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Bappeda memiliki peran penting dalam merumuskan dan mengkoordinasikan strategi pembangunan yang mencakup aspek ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam, dengan tujuan akhir mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat lokal. Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif dari berbagai sektor pemerintahan, termasuk ekonomi, sumber daya alam, kesejahteraan sosial, infrastruktur, dan lainnya. Dalam kerangka ini, Bappeda berperan sebagai penghubung antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, memfasilitasi dialog dan koordinasi untuk mencapai visi bersama dalam pengentasan kemiskinan.

Dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat enam strategi utama: mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas SDM, mengurangi kantong-kantong kemiskinan,

menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, serta menanggulangi dan mengurangi dampak bencana. Setiap strategi ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD terkait. Misalnya, strategi mengurangi beban pengeluaran melibatkan peningkatan pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF oleh Baitul Mal, serta penyediaan layanan kesehatan oleh Dinkes. Strategi meningkatkan pendapatan mencakup pembangunan prasarana pertanian dan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil, sementara strategi meningkatkan kualitas SDM melibatkan pelatihan keterampilan dan peningkatan pemahaman usaha mikro oleh Disnakertrans dan Diskoperindag.

Dari tabel kegiatan penanggulangan kemiskinan yang disajikan, dapat dilihat bahwa berbagai kegiatan dilakukan oleh masing-masing OPD yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Strategi mengurangi beban pengeluaran memiliki empat kegiatan, strategi meningkatkan pendapatan memiliki tujuh kegiatan, strategi meningkatkan kualitas SDM memiliki tujuh kegiatan, strategi mengurangi kantong-kantong kemiskinan memiliki tiga kegiatan, strategi menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok memiliki dua kegiatan, dan strategi menanggulangi dan mengurangi dampak bencana memiliki enam kegiatan dengan anggaran yang bersumber dari APBN, APBK, DAK, DAU, dan DOKA. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan multi-sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Dukungan dari sektor swasta, akademisi, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat luas sangat diperlukan. Pemerintah harus berperan sebagai katalisator dan fasilitator kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya. Sektor swasta memiliki peran penting dalam kolaborasi ini melalui program-program CSR (Corporate Social Responsibility) atau kemitraan dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Misalnya, Bank Aceh melalui program CSR-nya memberikan bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian mereka. Kolaborasi dengan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai inisiatif, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan, pendanaan usaha kecil, dan fasilitasi akses pasar bagi produsen lokal. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Kolaborasi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang, komunikasi dan komitmen menonjol sebagai dua faktor utama yang mendukung keberhasilan upaya tersebut. Komunikasi yang efektif memungkinkan koordinasi yang baik antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Bappeda, dan Bank Aceh, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami tujuan bersama dalam mengurangi kemiskinan. Melalui dialog tatap muka dan pertemuan rutin, instansi-instansi ini dapat berdiskusi secara terbuka mengenai tantangan yang dihadapi dan merumuskan strategi bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Komunikasi face-to-face (tatap muka) terbukti sangat penting dalam membangun pemahaman bersama dan mengatasi perbedaan pendapat serta menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Misalnya, rapat koordinasi rutin antar-OPD dan instansi terkait memungkinkan pembahasan

mendalam mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks ini, transparansi informasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah kemiskinan di daerah tersebut.

Selain komunikasi, komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat juga menjadi faktor penentu keberhasilan kolaborasi dalam mengentaskan kemiskinan. Komitmen ini tercermin dalam partisipasi aktif dalam rapat-rapat koordinasi, penandatanganan kesepakatan formal, serta kesediaan untuk mengikuti regulasi dan kebijakan yang telah disepakati bersama. Hal ini terlihat dari keterlibatan Bank Aceh dalam memberikan dukungan sosial kepada masyarakat terdampak, seperti bantuan pangan dan fasilitas kesehatan, yang merupakan bukti nyata dari komitmen mereka untuk berperan aktif dalam upaya mengurangi kemiskinan.

Dalam konteks regulasi dan kebijakan, komitmen juga memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan dari waktu ke waktu. Meskipun terdapat perubahan kepemimpinan, komitmen untuk melanjutkan program dan kegiatan yang telah disepakati sebelumnya tetap terjaga. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen bukan hanya bersifat personal, tetapi juga terkait dengan konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, kolaborasi antar-pemerintah dan sektor swasta serta komitmen yang kuat dari semua pihak terlibat merupakan fondasi utama dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan mempertahankan komunikasi yang efektif dan memperkuat komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai inisiatif, diharapkan upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dan mempercepat perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam mengatasi kemiskinan.

3.2 Faktor Pendukung Dan Penghambat Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang

Faktor pendukung utama dalam kolaborasi pemerintahan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang adalah adanya regulasi yang mendukung. Kabupaten ini telah menetapkan berbagai kebijakan dalam bentuk regulasi, seperti Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 45/369/2023 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Hal ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi berbagai instansi pemerintah daerah untuk bekerja sama secara terkoordinasi. Selain itu, adanya kesamaan tujuan di antara berbagai lembaga pemerintahan, seperti Dinas Sosial, Bappeda, PUPR, Kesehatan, dan Baitul Mal, juga mendukung kolaborasi ini. Dengan tujuan yang serupa, kolaborasi ini dapat mengintegrasikan pendekatan yang holistik dalam upaya mereka untuk mengatasi kemiskinan.

Namun, ada juga beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program-program pengentasan kemiskinan.

Meskipun terjadi peningkatan anggaran dari tahun ke tahun, seperti terlihat dalam data alokasi anggaran dari 2022 hingga 2024, namun masih terdapat tantangan dalam distribusi dan komposisi anggaran yang belum merata antara satu dinas dengan dinas lainnya. Hal ini dapat menghambat efektivitas program-program tersebut, terutama dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan signifikan. Kurangnya jumlah pendamping lapangan yang terlatih dan berpengalaman dapat mempengaruhi pelaksanaan program secara keseluruhan. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya insentif dan dukungan yang memadai bagi SDM di lapangan, serta kesulitan dalam pemutakhiran data yang akurat dan relevan untuk perencanaan program.

Dengan memahami dan mengatasi baik faktor pendukung maupun penghambat tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat meningkatkan efektivitas kolaborasi mereka dalam pengentasan kemiskinan. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta peningkatan sumber daya manusia agar dapat menghadapi tantangan yang ada secara lebih efektif.

3.3 Upaya Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Kolaborasi Pemerintahan Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang, beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Pertama, peningkatan alokasi anggaran menjadi salah satu langkah kunci. Dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan, pemerintah daerah dapat memperluas cakupan dan mendukung lebih banyak inisiatif. Hal ini juga memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan, sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tamiang, Bapak Zulfiqar, bahwa alokasi yang lebih besar memberikan kesempatan untuk lebih luas dalam menyediakan layanan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, pengembangan sumber daya manusia juga menjadi langkah penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan APBD untuk verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta memberikan bimbingan teknis secara teratur kepada para operator DTKS. Upaya ini mendukung peningkatan kualitas data yang akurat untuk merancang program dengan lebih tepat sasaran, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Zulfiqar dalam wawancaranya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan vokasional dapat ditingkatkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Kolaborasi yang efektif juga memerlukan adopsi teknologi dan inovasi dalam pemantauan dan evaluasi program secara terus-menerus. Dengan mengembangkan sistem informasi terpadu, pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi dampak program secara lebih efisien. Pendekatan ini tidak hanya memastikan efektivitas program tetapi juga memungkinkan penyesuaian yang cepat terhadap perubahan kondisi masyarakat.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini mendukung upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, mitra kerja sama, dan masyarakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan fokus pada peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan adopsi teknologi, diharapkan program pengentasan kemiskinan dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam diskusi temuan utama penelitian ini, perbandingan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan beberapa perbedaan dan kesamaan yang signifikan. Penelitian ini menyoroti bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang meliputi alokasi anggaran yang cukup dan efisien, pengembangan sumber daya manusia, serta adopsi teknologi dan inovasi dalam monitoring program. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa temuan ini konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Namun, penelitian ini juga menambahkan perspektif baru dengan menyoroti pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam konteks kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Hal ini dapat dilihat dari upaya peningkatan kualitas data DTKS melalui bimbingan teknis secara berkala, serta peran penting pendidikan dan pelatihan vokasional dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. Sementara itu, adopsi teknologi dalam pemantauan dan evaluasi program juga menjadi poin penting yang ditonjolkan dalam penelitian ini, sejalan dengan tren inovasi dalam pengelolaan program-program sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperluas pemahaman tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan, serta menggarisbawahi pentingnya strategi yang holistik dan terintegrasi dalam memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika lokal, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan program sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada tetapi juga memberikan panduan praktis bagi pengambil kebijakan dan praktisi dalam mengembangkan strategi kolaboratif yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan di tingkat lokal.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi mengenai temuan menarik dalam penelitian ini mengungkap beberapa aspek penting yang dapat menjadi sorotan dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang.

Salah satu temuan yang mencolok adalah perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk program-program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran dapat memperluas cakupan program dan meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menyoroti pentingnya dukungan finansial yang memadai untuk mendukung inisiatif-inisiatif sosial ekonomi.

Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam konteks kolaborasi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Upaya seperti bimbingan teknis untuk operator DTKS dan peningkatan kualitas pendidikan serta pelatihan vokasional memberikan dampak yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat miskin. Temuan ini konsisten dengan pendekatan holistik dalam menghadapi tantangan kemiskinan, yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga memperkuat kapasitas individu untuk mandiri secara ekonomi.

Adopsi teknologi dalam pemantauan dan evaluasi program juga menjadi temuan menarik dalam penelitian ini. Penggunaan sistem informasi terpadu untuk memantau dan mengevaluasi program-program sosial membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan intervensi yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini memberikan bukti bahwa teknologi dapat menjadi alat yang kuat dalam memajukan praktik pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mengelola program-program sosial.

Namun, beberapa tantangan juga muncul dalam implementasi temuan ini. Misalnya, keterbatasan sumber daya manusia dalam administrasi pemerintahan daerah mungkin menghambat upaya pengembangan sumber daya manusia yang optimal. Selain itu, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel tetap menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan dana yang dialokasikan benar-benar bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang dinamika pengentasan kemiskinan di level lokal. Implikasi dari temuan-temuan ini adalah perlunya pendekatan terintegrasi yang melibatkan berbagai stakeholder dan memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis tetapi juga memiliki implikasi praktis yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang rentan di Kabupaten Aceh Tamiang.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun kolaborasi telah berjalan dengan baik dalam banyak aspek, masih ada ruang untuk peningkatan. Misalnya, alokasi anggaran perlu ditingkatkan untuk

memperluas cakupan program dan meningkatkan efektivitas intervensi. Selain itu, komunikasi dan komitmen antarpihak terlibat perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua aspek program dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Di samping itu, temuan menunjukkan bahwa transparansi dalam pertukaran informasi dan kebijakan sangat penting dalam memastikan keberhasilan kolaborasi ini. Penggunaan teknologi, seperti aplikasi SIKS-Dataku, telah membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan pengawasan terhadap pengelolaan program sosial. Namun, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi kolaboratif ini.

Adapun faktor pendukung kolaborasi ini mencakup regulasi yang mendukung seperti Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, serta kesamaan tujuan antara berbagai entitas pemerintah dan mitra kolaboratif. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang tidak memadai memerlukan upaya lebih lanjut untuk diatasi.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang telah memberikan kontribusi yang signifikan, namun masih memerlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketersediaan sumber daya. Langkah-langkah seperti peningkatan alokasi anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan komunikasi serta komitmen antarpihak terlibat akan menjadi kunci untuk meraih keberhasilan yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan di daerah ini.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Pertama, batasan waktu menjadi faktor utama karena penelitian ini dilakukan dalam periode yang terbatas, mengharuskan fokus pada segmen waktu tertentu dalam dinamika kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Tamiang. Kedua, keterbatasan akses data menjadi tantangan, terutama dalam mengakses data historis yang komprehensif dan konsisten terkait implementasi program-program kolaboratif. Ketiga, keterbatasan dalam jumlah responden juga mempengaruhi generalisasi temuan, meskipun upaya maksimal dilakukan untuk memilih sampel yang representatif dari berbagai stakeholder terlibat. Selain itu, keterbatasan dalam sumber daya dan keuangan membatasi dalam melakukan pengumpulan data yang lebih mendalam dan melakukan pengujian hipotesis yang lebih luas. Meskipun demikian, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang sejelas mungkin tentang dinamika kolaborasi pemerintahan dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pengembangan kebijakan serta praktik terkait di masa mendatang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk mengarahkan masa depan penelitian ini, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk dikaji lebih lanjut. Pertama, penting untuk

mengeksplorasi lebih dalam mengenai dampak kolaborasi pemerintahan dalam pengentasan kemiskinan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Studi lanjutan dapat memperluas cakupan untuk memasukkan evaluasi lebih mendalam terhadap indikator keberhasilan program kolaboratif, termasuk dampak jangka panjang dari kebijakan yang diimplementasikan. Selain itu, penelitian masa depan dapat fokus pada analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi, seperti dinamika politik lokal, perubahan kebijakan nasional, serta peran masyarakat dalam proses ini. Selanjutnya, penting untuk mengintegrasikan pendekatan multi-metode untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kolaborasi tersebut, termasuk kombinasi antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Terakhir, penelitian dapat melibatkan pemetaan partisipatif yang lebih luas dengan melibatkan semua pihak yang terlibat secara aktif dalam pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan berdampak langsung pada upaya-upaya pemulihan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Dengan demikian, arah masa depan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan pengembangan strategi efektif dalam pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, M. (2022). Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh Dalam Pendekatan Collaborative Governance Oleh Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 7(4).
- Aprikindesa, T., Maimun, & Helmi. (2022). Strategi Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Aceh pada Tahun 2017-2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 7(3).
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).

- Hilmiyah, H. M. (2023). DAMPAK KEMISKINAN, KESENJANGAN DAN KEADILAN SOSIAL PADA EKONOMI KREATIF Penurunan Tingkat Kemiskinan di Era Pemerintahan Jokowi (Periode 1). *Journal Creative Economics and Trading Halal Ecosystem*, 1(01). <https://doi.org/10.56404/cethe.v1i01.61>
- Letor, R. P. (2021). POLICY ENTREPRENEURS DAN JARINGAN KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DESENTRALISASI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(1). <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i1.1526>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Musayyada, Y. (2024). Peran BAPPEDA Dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Kabupaten Pati. *Majalah Ekonomi*, 28(02). <https://doi.org/10.36456/majeko.vol28.no02.a8040>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sahar, A. R., & Salomo, R. V. (2018). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 4(2), 49-64.
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Sari, Y., & Falianto, A. (2020). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAMBI. *Journal Development*, 8(2). <https://doi.org/10.53978/jd.v8i2.154>
- Susanti, Y., & Arifin, N. R. (2019). PERANAN LAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LTPKD) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 7(2). <https://doi.org/10.25157/je.v7i2.3115>
- Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.
- Utama, L. S. (2018). ANALISIS SEKTOR BASIS PDRB DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PEMBANGUNAN INKLUSIF DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH. *MEDIA BINA ILMIAH*, 12(7). <https://doi.org/10.33758/mbi.v12i7.36>